

Judul : Berantas Mafia Tanah : Bersih-bersih Dulu di Internal ATR/BPN
Tanggal : Jumat, 22 Maret 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Berantas Mafia Tanah

Bersih-bersih Dulu Di Internal ATR/BPN

ANGGOTA Komisi II DPR Ongku Hasibuan menegaskan upaya memberantas mafia tanah di Indonesia bukanlah perkara yang mudah. Banyak kekuatan mafia tanah yang digerakkan oleh banyak oknum internal dalam institusi.

“Tidak bisa dipungkiri, sampai saat ini banyak melibatkan orang dalam. Mereka tidak mungkin bekerja sendiri. Pasti ada oknum internal yang terlibat dan hal ini yang perlu kita basmi. Baik itu dari yang mengeluarkan izin, aparat penegak hukum dan seterusnya,” ucap Ongku, Kamis (21/3/2024).

Ongku juga menyinggung terkait ketidakseriusan dari Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah. Ia menyayangkan karena telah merugikan banyak rakyat kecil.

“Buat saya tidak cukup dengan jargon fakta integritas, bebas

korupsi dan nepotisme. Saya harap Kementerian ATR/BPN bisa menyelesaikan dengan kesungguhan yang kuat dari seluruh stakeholder pertanahan,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Ongku menilai, masih banyak rakyat yang belum memiliki sertifikat tanah. Melihat kebutuhan akan tanah terus meningkat, dia tidak ingin hal ini dimanfaatkan untuk keberlangsungan praktik mafia tanah.

“Saya hanya berpikir jika banyak masyarakat yang tidak mendapat keadilan. Makanya, saya imbau segera mensertifikasi tanah mereka. Hal ini supaya mereka memperoleh hak atas tanah dan dijamin negara. Silakan manfaatkan dengan baik program Pemerintah untuk mempermudah melakukan sertifikasi tanah,” katanya.

Anggota Komisi II DPR Riyanta juga menyoroti maraknya



Ongku Hasibuan

kejahatan pertanahan terjadi di Indonesia. Untuk itu, dia mengimbau agar negara harus membuat pengakuan dosa, kuat, berwibawa serta hadir melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan tersebut.

“Jadi dalam hal ini kalau diperlukan, harus ada suatu

pernyataan pengakuan dosa dari negara, karena ini semua masalahnya itu ada di negara, jadi harapan saya negara ini harus kuat negara ini harus berwibawa dan kemudian negara ini harus hadir,” ujar Riyanta, Kamis (21/3/2024).

Banyaknya problematika tanah, kejahatan pertanahan, serta sertifikat ganda yang tumpang tindih, karena belum ada kepastian hukum mengenainya. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah berkeluh kesah mengenai persoalan pertanahan yang tidak ada penyelesaiannya dalam jangka waktu yang lama.

“BPN sangat sangat kacau balau. Kita tahu bersama akhirnya ini mulai terungkap seperti kemarin yang disampaikan menteri, kasus mafia tanah di Banyuwangi, Sumenep, Malang, Bogor kemudian Lampung. Itu semua melibatkan oknum ASN

di Badan Pertanahan Nasional semuanya,” kata Riyanta.

Kejahatan yang dilakukan oleh oknum negara ini menurut Riyanta, berkaitan dengan hak-hak masyarakat yang sudah mengeluarkan jerih payahnya untuk mendapatkan tanah tersebut tiba-tiba hilang begitu saja menjadi milik pihak lain.

“Warkah itu merupakan dokumen publik atau bisa saja direkonstruksikan kembali bahwa warkah itu dijadikan dokumen publik terbatas. Karena selama ini kita memahami betul seseorang yang sudah mempunyai sertifikat tanah, warkah itu menjadi miliknya,” terang Riyanta.

Menurut Riyanta, untuk ASN yang terlibat dan sudah melalui proses hukum dan divonis, kemudian perkara itu sudah inkrah, maka otomatis ASN tersebut diberhentikan dengan tidak hormat. ■ KAL